

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KEWENANGAN DESA

2021

PERBUP NO. 28 BD. 2021. NO. 28 LL. KAB. PEMALANG : 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan. Dalam rangka penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan perlu disusun pedoman layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perpres No. 62 Tahun 2019; Permendagri No. 2 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 96 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2015; Perbup No. 73 Tahun 2016; Perbup No. 17 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) dimaksudkan untuk mengaktifkan pelaksanaan layanan Adminduk ditingkat Desa bertujuan untuk mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan akses, mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel secara langsung kepada masyarakat dan menggerakkan sumber daya desa dalam pelaksanaan layanan Adminduk. Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah 1. Penyelenggaraan LABKD, 2. Fasilitasi Layanan Adminduk, 3. Dukungan para pihak dan 4. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan. Ketentuan tentang LABKD berlaku juga dalam penyelenggaraan pelayanan Adminduk di tingkat Kelurahan. Fasilitator Adminduk Desa (FAD) / Fasilitator Adminduk Kelurahan (FAK) yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini maka tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan FAD/FAK menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juli 2021
 - Terdiri dari 19 Pasal